

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai manajemen dakwah partai kebangkitan bangsa (PKB) dan dewan pengurus wilayah (DPW) PKB Sumatera Barat, khususnya pada aspek pemrograman, penjadwalan dan penganggaran maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pemrograman dakwah di DPW PKB Sumatera Barat dilaksanakan secara rencana melalui berbagai program pembinaan kader dan kegiatan keagamaan. program utama yang terjadi fokus adalah kaderisasi yang terdiri atas sekolah kader pertama (SKP), pendidikan kader minimal (PKM), dan pendidikan kajian nasional yang menjadi pedoman DPP PKB. terdapat kegiatan pengkajian, ceramah agama, dengan kyai, ulama dan tuanku, kunjungan ke pondok pesantren, serta perjuangan aspirasi masyarakat melalui jalur kebijakan publik seluruh program tersebut bertujuan membentuk badan yang memiliki kemampuan kepemimpinan, memahami nilai-nilai keislaman serta mampu menjalankan fungsi dakwah di tengah masyarakat.
2. Penjadwalan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada DPW PKB Sumatera Barat seperti Pencak walang program dakwah dilakukan secara sistematis melalui koordinasi antara DPP, DPW, dan DPD. Jadwal kegiatan ditetapkan dalam rapat kerja organisasi dengan memperhatikan agenda tahunan, kesiapan anggaran, ketersediaan narasumber, dan kondisi organisasi. DPP

memberikan ketentuan mengenai pelaksanaan kaderisasi minimal dua kali dalam satu tahun, sedangkan pelaksanaan teknis disesuaikan oleh masing-masing DPW dan DPC. apabila terjadi kendala atau bentuk jadwal, dilakukan penyesuaian melalui koordinasi sehingga seluruh kader tetap memperoleh kesempatan mengikuti proses kaderisasi.

3. Penganggaran program dakwah disusun berdasarkan kebutuhan setiap kegiatan dan mengacu pada ketentuan organisasi. sumber pendanaan berasal dari bantuan keuangan partai politik dan (BanPol), iuran anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, anggota DPR RI, iuran fraksi, serta dana operasional partai pengelolaan anggaran dilakukan oleh bendahara dan sekretariat partai. dengan menyerahkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. setiap penggunaan dana wajib disertai bukti pertanggungjawaban (SPJ) dan dievaluasi melalui musyawarah wilayah muslim musyawarah cabang (Muscab), mutlak serta pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Secara keseluruhan, manajemen dakwah di PPP PKB Sumatera Barat telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi pemrograman penjadwalan, dan penganggaran secara teratur. pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut mendukung tercapainya tujuan dakwah partai, yaitu membentuk kader yang berkualitas, memperkuat hubungan dengan ulama dan masyarakat, serta memperjuangkan kepentingan umat melalui kegiatan keagamaan dan kebijakan publik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Pemrograman Partai Kebangkitan Bangsa pada Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Barat. DPW PKB Sumatera Barat diharapkan dapat meningkatkan pemrograman kegiatan dakwah secara lebih terstruktur dan sistematis. Program yang telah dirancang, seperti kaderisasi, pengajian, ceramah keagamaan, silaturahmi dengan ulama dan kiai, kunjungan ke pondok pesantren, serta kegiatan sosial, hendaknya terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kader dan masyarakat. Selain itu, setiap program sebaiknya memiliki tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan yang lebih jelas agar pelaksanaan program dapat diukur dan dievaluasi secara berkala. Pemrograman juga perlu tetap bersifat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini sejalan dengan teori pemrograman yang menekankan pentingnya penyusunan langkah-langkah kegiatan secara sistematis serta adanya alternatif apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan.
2. Penjadwalan Partai Kebangkitan Bangsa pada Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Barat. DPW PKB Sumatera Barat diharapkan dapat meningkatkan sistem penjadwalan kegiatan dakwah agar seluruh program dapat terlaksana secara lebih efektif dan teratur. Penyusunan jadwal hendaknya mempertimbangkan kesiapan peserta, narasumber, tempat, sumber daya, serta anggaran yang tersedia. Selain itu, perlu disiapkan jadwal alternatif apabila terjadi perubahan atau benturan dengan kegiatan organisasi lainnya.

Mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan beberapa kegiatan menyesuaikan dengan pencairan dana bantuan politik, maka DPW PKB Sumatera Barat perlu membuat perencanaan waktu yang lebih fleksibel agar kegiatan dakwah tetap dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Penganggaran Partai Kebangkitan Bangsa pada Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Barat. DPW PKB Sumatera Barat diharapkan dapat terus meningkatkan penganggaran kegiatan dakwah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penyusunan anggaran hendaknya disesuaikan dengan prioritas program serta kebutuhan masing-masing kegiatan, sehingga sumber daya keuangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, evaluasi antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi penggunaan anggaran perlu dilakukan secara berkala sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan anggaran berikutnya. Kelengkapan bukti pertanggungjawaban dan laporan keuangan juga perlu terus dipertahankan agar pengelolaan dana kegiatan dakwah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan organisasi. Dengan demikian, penganggaran tidak hanya menjadi pendukung pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dapat menjamin keberlangsungan program dakwah DPW PKB Sumatera Barat.

C. Keterbatasan penelitian.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu hanya memfokuskan kajian pada fungsi manajemen dakwah yang meliputi program, penjawalan, dan penganggaran di DPW PKB Sumatera Barat. dari hasil wawancara dengan narasumber tertentu sehingga hasil penelitian. masih terbatas pada konteks organisasi yang diteliti berarti selanjutnya diharapkan dapat melibatkan lebih banyak informasi dan mengkaji seluruh fungsi manajemen dakwah agar diperoleh hasil yang lebih banyak informasi yang mengkaji seluruh fungsi manajemen dakwah agar diperoleh hasil yang lebih mendalam.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adhani, Duwi. (2017). *Fungsi Pengorganisasian Partai Politik dalam Mengembangkan Dakwah Islam*.
- Alfian, (2018), *Manajemen Perencanaan Dakwah*, *Jurnal Manajemen Dakwah*, Ardiyansah, Nur Rofiq, dkk (2021), *Strategi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Mendongkrak Perolehan Suara Pemilu 2019 Di Kabupaten Pati*, *Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 4.2.
- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2014). *Management control systems* (14th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education.
- Anwar, M. (2016). *Kebangsaan dan Moderasi dalam Dakwah Politik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arrasuli, Beni Kharisma. (2008). *Gerakan Politik Islam di Sumatera Barat (Studi Terhadap Partai PERTI Tahun 1928–1969)*.
- Aziz, Abdul. (2004). *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Prenada Media.
- Aziz, Muhammad. (2012). *Manajemen Dakwah: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Azra, A. (2003). *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*. Logos Wacana Ilmu.
- Bachtiar, W. (2014). *Sosiologi Politik Islam*. Remaja Rosdakarya.
- Chaniago, Pajri. (2022). *Penggerakan Dakwah Pimpinan Daerah TARBIYAH-PERTI Provinsi Sumatera Barat*.
- Firmanzah. (2011). *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Partai Politik di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Handoko, T. H. (2012). *Manajemen* (Ed. 2). BPFE Yogyakarta.
- Hasanah, Uswatun. (2010), *Manajemen Dakwah*, Pamekasan : Kaff Publishing
- Hilmy, Masdar.(2017). *Islamism and Democracy in Indonesia*. Singapore: ISEAS. Hasanah, Uswatun. (2010), *Manajemen Dakwah*, Pamekasan : Kaff Publishing
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu, (2016), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Hidayat, M. (2015). *Politik dan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo

- Persada. Karyoto. 2002. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Karyoto. (2002). *Dasar- Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset
- Kerzner, H. (2017). *Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling* (12th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Miriam, Budiarjo (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Muhammad, (2008), *Metodologi Penelitian Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Press
- Muhammad Qodaruddin, Abdullah (2019), *Pengantar Ilmu Dakwah*, Jakarta: Qiara Media
- Mulyadi, A. (2003). *Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Mulyadi. (2012). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munir, M., & Ilaihi, W. (2006). *Manajemen Dakwah*. Kencana.
- Mustain, (2011) *Materi Manajemen Dakwah*, Jakarta : Direktorat Penerangan Agama Islam
- Nafarin, M. (2017). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Natsir, M. (2008). *Fiqhud Da'wah: Jejak Risalah dan Strategi Dakwah*. Capaian Pres.
- Noor, Firman.(2015) *Partai Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Rahardjo, M. Dawam. (2002). *Ensiklopedi Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Ramlan, Surbakti (2010) *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Ridla, Muhammad Rosyid, (2008), *Perencanaan Dalam Dakwah Islam, Jurnal Dakwah*, 9.2
- Ruslan, Rosady, (2003), *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Sahabat, Ujang., Mukarom, Zaenal., & Sa'diah, Dewi. (2018). *Perencanaan Dakwah Partai Politik Islam*.
- Siagian, S. P. (2005). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suyatno.(2020). *PKB dan Basis Politik Nahdliyin*. Jakarta: LP3ES.
- Taufik, Muhammad. (2019). *Strategi Komunikasi Politik Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Riau dalam Mengembangkan Partai*.
- Terry, G. R. (2006). *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Terry, George R, (2013), *Dasar Dasar Manajemen* Malang : Inteligensia
- Tohirin. (2007). *Manajemen Dakwah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Wahid, Abdurrahman, dkk. (1998). *Pro-Kontra Partai Kebangkitan Bangsa*. Jakarta: Fatma Press.

